



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU MILIAR SATU KELURAHAN (SAMISAKE) DI KOTA BENGKULU (STUDI KASUS : KELURAHAN PADANG JATI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU)

Sukatno¹

Sugeng Suharto²

*¹) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

*²) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

¹ E-mail: sukatno@gmail.com ² E-mail: sugengsuharto@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received: 18 februari 2021

Revised: 19 Februari 2021

Accepted: 28 Februari 2021

Available online: 15 April 2021

KEYWORDS

*Policy Implementation, Samisake Policy,
Implementation Samisake, Samisake
implementation aspects.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Samisake di kota Bengkulu dengan studi kasus di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program khususnya kelurahan Padang Jati. Samisake tidak sesuai dengan harapan. Penyaluran dana tidak sesuai dengan harapan penerima atau masyarakat dana. Tujuan utama peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru belum tercapai. Begitu juga dengan peningkatan daya saing daerah yang belum terlihat, karena program Samisake baru dilaksanakan dan pada tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan program Samisake. Terakhir, tidak terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pemerintah kota, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat secara partisipatif. Pencapaian yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan perwal No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan perwal No. 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of program policies Samisake in Bengkulu city with a case study in Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. This study used a qualitative descriptive method and data collection was conducted using in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of program policies, especially kelurahan Padang Jati. Samisake is not in line with expectations. Distribution of funds is not in accordance with the expectations of the recipient or public funds. The main goal for the increased revenue and social welfare has been no increase in income and overall welfare of the community yet. Expansion of employment opportunities and the creation of new jobs has not been achieved. So also with the increase in competitiveness of the region has not seen, because the new Samisake programs implemented and in 2014 was the first year of program implementation Samisake. Finally, not the creation of populist economic empowerment by involving city government, business, and community participation participatory. The achievement of expected not in accordance with the objectives of perwal No. 27 Year 2013 on Implementation Guidelines for Management of Revolving Fund Samisake and perwal No. 28 Year 2013 on Technical Guidelines for Management of Revolving Fund Samisake.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menganut sistem terbuka, dimana pemilihan kepala negara dan kepala daerah serta anggota legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat menghasilkan seorang pemimpin terpilih dengan program-program kerjanya yang cenderung berbeda dengan pemimpin terdahulu. Demikian halnya yang terjadi di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Pada tahun 2012 telah berlangsung pemilihan kepala daerah atau walikota Bengkulu, dan terpilih lah Helmi Hasan. Walikota terpilih mengusung beberapa program yaitu:

1. Perbaikan infrastruktur jalan dan drainase serta ketersediaan air bersih.
2. Memperbaikisistem pengelolaan sampah.
3. Pembangunan lampu jalan di sejumlah titik di Kota Bengkulu.
4. Penataan birokrasi.
5. Bantuan untuk usaha kecil menengah dengan sistem Rp. 1 Miliar di tiap kelurahan (Satu Miliar Satu Kelurahan/Samisake).

Sebagai salah satu program kerja Walikota Bengkulu, program bantuan usaha kecil menengah dengan sistem Rp.

1 Miliar setiap kelurahan yang ada di Kota Bengkulu sudah dalam proses atau tahapan pelaksanaan. Kegiatan Satu Miliar Satu Kelurahan selanjutnya disingkat Samisake adalah Kegiatan kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia u/saha, serta sektor non- pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal

yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.

Dana bergulir ini dimaksudkan adalah untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Dimana dana bergulir Samisake yang dimaksudkan Perda No.12 Tahun 2013 pada pasal 1 ayat 4.

Pengucuran dana Samisake tahap pertama bekerjasama dengan PNPM perkotaan sebesar Rp 3 miliar. Terdata sebanyak 2600 warga kota Bengkulu yang sudah menikmati manfaat APBD untuk rakyat dari Samisake periode awal tersebut. Kemudian pada tahap dua dikucurkan kembali sebesar Rp 19 miliar dengan penerima manfaat kurang lebih 1800an. Sehingga penerima manfaat samisake ditahun 2013 sebanyak 22.000 jiwa. Selain itu, Dana bergulir sebesar Rp 13.749.000.000,- disalurkan kepada 62 LKM di 9 kecamatan yang telah memenuhi syarat. Ada pun dana samisake yang telah di kucurkan di kelurahan- kelurahan sebanyak 62 kelurahan yang telah mendapatkan manfaat samisake (Bengkulukota.go.id).

Kota Bengkulu membutuhkan total anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp. 67 Miliar untuk program Samisake. Sedangkan masih banyak infrastruktur lain yang membutuhkan dana. Program kerja ini oleh sebagian pihak merupakan kebijakan yang tidak relevan dengan keadaan dan situasi Kota Bengkulu. Keadaan Kota Bengkulu saat ini masih membutuhkan perbaikan- perbaikan

pembangunan seperti jalan, penerangan jalan, air bersih, drainase, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendidikan yang masih memperhatikan.

Salah satu kelurahan yang mendapatkan dana program Samisake ini yaitu Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu. Kelurahan Padang Jati sudah melaksanakan program Samisake sejak bulan Maret, April, Mei Tahun 2014.

Dimana pada pemberian dana bergulir Samisake yang disalurkan tidak sepenuhnya dana yang dianggarkan direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Di Kelurahan Padang Jati diketahui bahwa pada bulan Maret 2014 terdapat 25 orang menerima dana sebesar Rp. 37.000.000,-. Sedangkan pada bulan April 2014 terdapat 26 orang menerima dana sebesar Rp. 44.500.000,-. Pada bulan Mei 2014 terdapat 25 orang menerima dana sebesar Rp. 40.000.000,-. Total dana yang dianggarkan adalah Rp. 280.000.000,- sedangkan yang disalurkan sebesar Rp. 121.500.000,-. Dengan sisa anggaran yang belum disalurkan sebesar Rp. 158.500.000,-.

Maka dari itu peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai program Samisake yang telah dilaksanakan dan mengetahui hasil dari program Samisake sesuai dengan tujuan diadakannya program Samisake di Kota Bengkulu yaitu

1. Untuk mengidentifikasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
2. Untuk mengidentifikasi perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru,
3. Untuk mengidentifikasi peningkatan daya saing daerah.
4. Untuk mengetahui terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sejumlah metode untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Sejumlah metode yang digunakan antara lain:

- Observasi: Muhammad dan Djaali (2005, 31) mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan, yang dalam penelitian ini adalah program Satu Miliar Satu Kelurahan.
- Wawancara mendalam: wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (Nazir, 1983, 234).

Berdasarkan tujuannya, tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan memberikan suatu bentuk penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai evaluasi pendahuluan kebijakan Samisake di Kota Bengkulu.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian murni karena penelitian ini memiliki orientasi akademis. Munculnya tema dan proses penelitian merupakan kebutuhan intelektual bagi peneliti sehingga didalamnya terdapat nilai kebebasan bagi peneliti untuk memilih permasalahan dan subjek penelitian.

Berdasarkan penggunaan waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross sectional. Penelitian cross sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Oleh karena itu,

fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pendahuluan kebijakan Samisake di Kota Bengkulu pada waktu tertentu sampai penelitian ini selesai dan tidak dimaksudkan untuk diperbandingkan dengan penelitian lain pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research).

Sebagai penelitian lapangan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini lebih mengandalkan pada observasi langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian serta wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

Peneliti memilih Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Peneliti memilih lokasi Kelurahan Padang Jati mengingat pelaksanaan kebijakan Satu Miliar Satu

Kelurahan merupakan program yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu terpilih periode 2013-2018 yang menjadi kontroversi di masyarakat akan kemampuan pemerintah khususnya walikota terpilih dalam melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang terdapat di Kelurahan Padang Jati ini pun tentu akan lebih kompleks. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan program Satu Miliar Satu Kelurahan.

Dalam hal ini, peneliti beranggapan bahwa tugas untuk melaksanakan program Satu Miliar Satu Kelurahan menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Kota Bengkulu harus mendorong instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program tersebut terutama dalam hal dana, instansi-instansi tersebut yakni: Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kota Bengkulu, Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, LKM BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. Selain itu, hasil penelitian merupakan pengolahan data melalui suatu proses analisis data, kemudian melakukan pembahasan dari hasil analisis yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel agar mudah dipahami oleh pembaca dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Aspek Implementasi Kebijakan Program Samisake

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aspek penelitian merupakan penjabaran yang menjadi tolak ukur penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) aspek penelitian yang digunakan. Berikut merupakan hasil penelitian berdasarkan aspek penelitian yang dilakukan.

1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu masih rendah, sehingga diadakannya program Samisake yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum adanya program dana bergulir Samisake, masyarakat terkendala pada modal usaha.

2. Perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru

Aspek penelitian kedua yaitu perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui

penciptaan lapangan kerja baru. Dana bergulir Samisake diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru.

3. Peningkatan daya saing daerah

Meningkatkan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan diadakannya program dana bergulir Samisake. Dimana daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan pendapatan yang tinggi dan penghidupan masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut (Harsono: 2013). Daya saing Kota Bengkulu sebelum adanya program Samisake menduduki peringkat rendah.

4. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan

Aspek penelitian yang terakhir yaitu terlaksananya upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemerintah Kota Bengkulu juga mengupayakan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program dana bergulir Samisake ini, terutama pada unit kerja.

Pada sub bagian ini merupakan hasil pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang dilihat dari keempat aspek penelitian. Berikut merupakan hasil pembahasan.

1. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, Saichudin, dan Maulizar, 2008).

2. Perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru

Program pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas dimaksudkan untuk mendorong, meningkatkan dan memasyarakatkan produktivitas tenaga kerja terutama di kelompok koperasi, usaha kecil dan usaha menengah. Melalui kegiatan- kegiatan dalam program ini, diupayakan penciptaan iklim yang dapat mendorong perluasan lapangan kerja dan peningkatan efisiensi secara menyeluruh.

Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja. Pemecahan masalah pengangguran tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penempatan tenaga kerja di sektor formal, namun juga melalui upaya- upaya pembinaan dan fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja antara lain dilakukan dengan pembinaan dan fasilitasi pembentukan wirausaha baru di sektor informal. Penciptaan wirausaha mempunyai nilai strategis karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan dan kesempatan kerja baru serta menopang perekonomian daerah.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan

kerja yang luas bagi masyarakat dengan begitu maka dapat mengatasi penggangguran penduduk. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan / kekurangan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya dan proses perbaikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara implementasi otonomi daerah saat ini dihadapkan pada tantangan era globalisasi yang semakin berat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

4. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan

Pembangunan perkotaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perkotaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi

produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Suharto (2005: 60) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

PENUTUP

Program dana bergulir Samisake yang telah berjalan di Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 4 (empat) aspek penelitian, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat penerima dana Samisake belum terlihat, hal ini dikarenakan program Samisake baru berjalan pada tahun pertama dan baru dilaksanakan 3 tahap atau 3 kali pengucuran dana. Belum adanya peningkatan pendapatan masyarakat berarti belum tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
2. Perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Belum adanya perluasan kesempatan kerja, hal ini dikarenakan dana yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan oleh penerima dana yang dianggap penerima belum mencukupi untuk mengembangkan

usaha karena harga-harga barang yang naik. Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru juga belum terlihat. Karena penerima dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati rata-rata merupakan pedagang lama atau yang sudah memiliki usaha sebelumnya serta belum mempunyai para penerima dana tersebut untuk merekrut tenaga kerja bagi usaha para penerima dana.

3. Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah pada pelaksanaan program dana bergulir Samisake juga belum menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program ini. Belum lamanya pelaksanaan program Samisake ini menjadi salah satu faktor penyebab belum adanya peningkatan daya saing daerah.
4. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif. Hal ini juga belum terlihat keberhasilannya pada pelaksanaan program dana bergulir Samisake. Karena masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program Samisake yang sebenarnya membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah Kota Bengkulu, sebab belum meratanya masyarakat yang menerima dana bergulir Samisake ini. Tentu saja hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program Samisake, mengingat jumlah penduduk di kelurahan Padang Jati mencapai 5577 penduduk, dan rata-rata pekerjaan mereka merupakan pedagang dan pemilik usaha mikro.

Berikut ini terdapat beberapa saran sebagai bahan masukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan masyarakat, program dana bergulir Samisake hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program Samisake. Agar tujuan program Samisake untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru. Tujuan program Samisake untuk memperluas kesempatan kerja harusnya diimbangi dengan dana yang digulirkan disesuaikan dengan kebutuhan para penerima dana, agar para
3. Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan terlihat jika pemerintah konsisten dengan tujuan yang telah direncanakan dari program dana bergulir Samisake ini.
4. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif. Pemerintah Kota Bengkulu harus lebih teliti dalam menyeleksi para penerima dana, agar dana yang telah dikucurkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan penguatan ekonomi kerakyatan.

REFERENSI

- Bryman, Alan dan Robert G. Burgess. 1999. *Qualitative Research*. Great Britain. SAGE Publications Ltd. Perspective Concepts and Cases. New Jersey. Pearson Education International.
- Casley, Kumar dan Krishna Kumar. 1991. *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Cheema, G. Shabbir. 1981. *Institutional Dimensions of Regional Development*. Japan. Maruzen Asia
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta. KIK Press.
- David, Fred R. 2001. *Strategic Management: Concepts and Cases 8th edition*. New Jersey. Prentice Hall
- Fischer, Frank & Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. United States of America. Taylor and Francis Group.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. FH UII Press
- Husnan, Suad dan Suwarsono Muhammad. 2000. *Studi Kelayakan Proyek*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN
- Hutabarat, Jemsly dan Martani Huseini. 2006. *Strategik di Tengah Operasional*. Jakarta. PT. Elex Media Computindo.
- Inayatullah, dan Kuldeep Mathur. 1980. *Monitoring and Evaluation of Rural Development: Some Asian Experiences*. Malaysia. Asian and Pacific Development Administration Centre.
- Kim, B. S., Atkinson, D. R., & Yang, P. H. (1999). The Asian Values Scale : Development, Factor Analysis, Validation, and Reliability. *Journal of Counseling Psychology*, 46(3), 342-352.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kusek, Jody Zall dan Ray C.Rist. 2004. *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington DC. The World Bank
- McGill, Ronald. 1996. *Institutional Development: A Third World Management Perspective*. London. MacMillan Press LTD.
- M.S., Joko Widodo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Nazir, Mohammad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Neuman, Lawrence R. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America. Pearson Education.
- Prasojo, Eko, dan Irfan R. Maksum dan Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok. Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Peters, B. Guy. 2000. *Institutional Theory in Political Science*. London and New York. Continuum.
- Royse, David et.al. 2006. *Program Evaluation: An Introduction 4th ed*.

United States of America. The Thomson
Brooks Corporation.

Tambunan, T.TH.. 2012. Perekonomian
Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia:
Bogor.

Todaro, Michael, P., dan Smith, Stephen, C
2006. Pembangunan Ekonomi.

Jilid 1. Edisi 8. Penerbit Erlangga: Jakarta.